DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN 2013 S.D. 2018

No	T	I		1	T	1	
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini	Menjamin Laporan Keuangan yang dibuat sesuai SAP	Berdasarkan Opini BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltim	LHP BPK-RI pada Buku I	Inspektur
	Pemerintah (SAP)	Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%	Menjamin Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesauai SAP	Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemprov dan SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	%	Menjamin Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan Penetapan Kinerja	Melakukan Pemeriksa an atas Kinerja SKPD yang meliputi : Capaian prog/keg, keuangan, SDM, Asset, SPI, dan 3 E.	Laporan Hasil Pemeriksa an Kinerja SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh SKPD sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP SKPD yang disesuai dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP Pemda Kab/Kota yang disesuai dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	Menjamin LPPD yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan Pedoman Evaluasi.	Melakukan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota, dari hasil evaluasi diperoleh Kab/Kota nilai Sangat Tinggi dibanding dengan jumlah LPPD Kab/Kota yang dievaluasi.	Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota	Inspektur dan Irban-Irban serta BPKP Perwakilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpang an yang terjadi dalam Penyelenggara an Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyakarat yang ditangani	%	Menjamin pengaduan masyarakat yang diterima terbukti kebenaran nya atau tidak	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk dibanding dengan yang diperiksa / di tangani.	Rekapitu lasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadu an Masyara kat	Inspektur dan Irban Khusus
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	Menjamin tingkat pelanggaran disiplin Pegawai dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai	Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kasus-kasus pelangga ran disiplin	Inspektur dan Irban Khusus
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	Menjamin kasus-kasus KKN dilingkungan Pemprov dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus KKN	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus-Kasus KKN	Inspektur dan Irban-Irban
		SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	Menjamin SKPD yang ditetapkan sebagai ZI WBK/ WBBM dapat berintegritas	Melakukan evaluasi dan pendamping an kepada SKPD yang menjadi Pilot Project ZI menuju WBK/ WBBM sesuai Template Evaluasi ZI	Laporan Hasil Evaluasi	Inspektur dan Irban-Irban
4.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	Menjamin tindak lanjut yang disampaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi	Membanding kan jumlah temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dengan kesesauaian tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan	Matrik Penyele saian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	Inspektur dan Irban-Irban, Sekretaris dan Subbagian.
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	Menjamin cakupan pengawasan dapat ditingkatkan	Membanding kan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan target yang ditetapkan dalam PKPT	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawa san	Inspektur dan Irban-Irban

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim	Level	Menjamin Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3	Hasil Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi	Inspektur, Irban- Irban dan Sekretaris

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan	a.	Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	WTP
	Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi	b.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	80
	Pemerintah (SAP)	C.	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	80
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	a.	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja	97
	instansi pemerintah berdasarkan hasil audit	b.	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	75
	dan evaluasi APIP	C.	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota	75
		d.	Persentase EKPPD Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi	80
3.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang	a.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	95
	terjadi dalam penyelenggaraan	b.	Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi	2
	pemerintahan	c.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai	10
		d.	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM	2
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	a.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90
5.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.	a.	Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	45
6.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas	a.	Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai (48 OPD)	95
	pelaksanaan pengawasan	b.	Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	95

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Program / Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Rp.	2.369.500.000,00	APBD
	- Reviu Atas Laporan Keuangan			
	- Pemeriksaan Kinerja SKPD			
2.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp.	611.500.000,00	APBD
	- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja			
	Pemda			
3.	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Rp.	1.033.200.000,00	APBD
	- Penanganan Pengaduan Masyarakat			
	- Pencegahan dan Pemberantasan KKN			
5.	Pembangunan Zona Integritas	Rp.	103.300.000,00	APBD
	- Penerapan Zona Integritas pada			
	SKPD			
6.	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut	Rp.	136.500.000,00.	APBD
	Hasil Pengawasan			
	- Evaluasi Berkala Temuan Hasil			
	Pengawasan			
7.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Rp.	343.000.000,00	APBD
	Pemerintah Daerah			
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			
	Aparatur			
8.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga	Rp.	63.860.000,00	APBD
	Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			
	- Pelatihan Pengembangan Tenaga			
	Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.			
9.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Rp.	535.000.000,00	APBD
	Pemerintah Daerah			
	- Koordinasi dan Konsultasi			
	Kelembagaan Pemerintah Daerah			

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatkan	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP
	Pengendalian Internal	b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang	2
	Pemerkntahan Daerah		Berkinerja Tinggi	
		C.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3
		d.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil	29
			Evaluasi SAKIP Katagori ≥ B	
		e.	Persentase Tingkat Penyelesaian	80
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
2.	Meningkatkan	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang	5
	Pembinaan dan		mendapat Predikat " Sangat Tinggi "	
	Pengawasan Pemerintah		dalam Evaluasi KPPD	
	Kabupaten/Kota	b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil	5
			Evaluasi SAKIP Katagori " B "	
3.	Meningkatkan	a.	Persentase penangangan pengaduan	100
	Pencegahan Korupsi ,		masyarakat yang ditangani	
	Kolusi dan Nepotisme	b.	Persentase pelanggaran Disiplin yang	80
	(KKN)		Ditindaklanjuti	
		C.	Persentase Tingkat Kepatuhan	
			Penyampaian :	
			LHKPN	60
			LHKASN	60
		d.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	15
		e.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	65
		f.	Perangkat Daerah yang ditetapkan	1
			sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	
4.	Meningkatkan integritas,	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3
	kompetensi dan	b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang	50
	profesional APIP.		bersertifikat	

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penjamin Mutu Laporan	Rp.	3.365.125.000,00	APBD
	Keuangan			
2.	Program Penyusunan Dokumer		300.000.000,00	APBD
	Perencanaan, Pengendalian dan			
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan			
3.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp.	1.597.500.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Penyelesaian	Rp.	189.300.000,00	APBD
	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			

5.	Program	Penceg	ahan	dan	Rp.	496.380.000,00	APBD
	Pemberar	ntasan KKN					
6.	Program I	Pengembangar	n Zona	Integritas	Rp.	144.900.000,00	APBD
7.	Program	Peningkatan	Profe	sionalisme	Rp.	2.643.000.000,00	APBD
	Tenaga	Pemeriksa	dan	Aparatur			
	Pengawas	san					

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Prov. Kaltim

Jabatan : Inspektur Provinsi Kaltim

Tugas : 1. Membantu Gubernur Dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

3. Pengawana untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.

4. Penyusunan Laporan dari hasil pengawasan.

5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.

6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan

7. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini WTP	Menjamin Laporan Keuangan yang dibuat sesuai SAP	Berdasarkan Opini BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltim	LHP BPK-RI pada Buku I
	Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	80%	Menjamin Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesauai SAP	Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemprov dan SKPD
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	97%	Menjamin Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan Penetapan Kinerja	Melakukan Pemeriksa an atas Kinerja SKPD yang meliputi : Capaian prog/keg, keuangan, SDM, Asset, SPI, dan 3 E.	Laporan Hasil Pemeriksa an Kinerja SKPD
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	75 Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh SKPD sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP SKPD yang disesuai dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	75 Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP Pemda Kab/Kota yang disesuai dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	80 %	Menjamin LPPD yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan Pedoman Evaluasi.	Melakukan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota, dari hasil evaluasi diperoleh Kab/Kota nilai Sangat Tinggi dibanding dengan jumlah LPPD Kab/Kota yang dievaluasi.	Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpang an yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyakarat yang ditangani	95 %	Menjamin pengaduan masyarakat yang diterima terbukti kebenaran nya atau tidak	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk dibanding dengan yang diperiksa / di tangani.	Rekapitu lasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadu an Masyara kat
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	10 Kasus	Menjamin tingkat pelanggaran disiplin Pegawai dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai	Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kasus-kasus pelangga ran disiplin
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	2 Kasus	Menjamin kasus-kasus KKN dilingkungan Pemprov dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus KKN	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus-Kasus KKN
		SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	2 OPD	Menjamin SKPD yang ditetapkan sebagai ZI WBK/ WBBM dapat berintegritas	Melakukan evaluasi dan pendamping an kepada SKPD yang menjadi Pilot Project ZI menuju WBK/ WBBM sesuai Template Evaluasi ZI	Laporan Hasil Evaluasi
4.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	90 %	Menjamin tindak lanjut yang disampaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi	Membanding kan jumlah temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dengan kesesauaian tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan	Matrik Penyele saian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	95 %	Menjamin cakupan pengawasan dapat ditingkatkan	Membanding kan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan target yang ditetapkan dalam PKPT	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawa san
		Presentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	95%	Menjamin program pengawasan yang sudah ditetapkan dalam PKPT dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.	Membandingkan jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan PKPT yang telah ditetapkan.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
6.	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang bersertifikat	45 Org	Menjamin tersedia SDM Aparatur Pengawasan yang professional dan berintegritas dengan dukungan sertifikasi penjenjangan.	Membandingkan jumlah SDM Aparatur Pengawasan bersertifikat dengan yang belum mempunyai sertifikat penjenjangan	Daftar Personil Aparatur Pengawasan Yang Memiliki Sertifikat Penjenjangan
	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim	Level 3	Menjamin Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3	Hasil Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) INSPEKTUR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

1. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Jabatan : Inspektur Provinsi Kalimantan Timur

3. Tugas : Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

4. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;

2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.

3. Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atau Penugasan dari Gubernur.

4. Penyusunan Laporan dari Hasil Pengawasan.

5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.

6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan

7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerkntahan Daerah	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang- Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja " Tinggi " sesuai hasil pemeriksaan/Audit	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di	Laporan Hasil Evaluasi BPKP

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori ≥ B	29	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Pemda Prov. Kaltim Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	5	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori "B"	5	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase penangangan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat
		Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	80	Belum optimalnya tindak lanjut tas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksan di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN	60	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
		LHKASN	60		dan LHKASN di kali 100%.	LHKASN
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	15	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	65	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP
		Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	50	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN : 2018

TAHUN	: 2018 SASARAN STRATEGIS			KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET		TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
OKAIAN				ORAIAN	INDIKATOR RINERSA					
Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi	a. Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	TW 1:- TW 2: WTP TW 3:- TW 4:-	4 Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Reviu Atas Laporan Keuangan	G Jumlah Laporan Keuangan Pemprov yang direviu	7 Laporan	1	400.000.000	10 Inspektur dan Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan OPD.
Pemerintah (SAP)	b. Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	TW 1 : - TW 2 : 80 % TW 3 : - TW 4 : -			Jumlah Laporan Keuangan OPD yang direviu	Laporan	12			
	c. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	TW 1 : - TW 2 : 80 % TW 3 : - TW 4 : -								
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 97 %	Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Pemeriksaan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja OPD yang diperiksa.	Laporan	48	650.000.000	Inspektur dan Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan atas Kinerja OPD.
	 Persentase EKPPD Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi 	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 80 % TW 4 : -			Jumlah LPPD Pemda Kab/Kota yang dievaluasi	Laporan	10	500.000.000	Inspektur dan Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKPPD Pemda Kab/Kota.
	c. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	TW 1 : - TW 2 : 75 Skor TW 3 : - TW 4 : -	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja/LKjIP OPD yang dievaluasi.	Laporan	39	391.150.000	Inspektur dan Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKJIP OPD
	d. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/ Kota	TW 1 : - TW 2 : 75 Skor TW 3 : - TW 4 : -			Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja/LKJIP Pemda Kab/Kota yang dievaluasi.	Laporan	4	220.000.000	Inspektur dan Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKJIP Pemda Kab/Kota
Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani Jumlah kasus pelanggaraan dispilin pegawai	TW 1:- TW 2:- TW 3:- TW 4:95 % TW 1:- TW 2:- TW 3:-	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang diperiksa/ditangani	Laporan	20	182.000.000	Inspektur dan Irbanwas Khusus	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang masuk untuk mengecek kebenarannya.
	c. Jumlah Kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi	TW 4 : 10 Kasus TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 2 Kasus	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN yang dilaksanakan.	Kegiatan	4	1.478.700.000	Inspektur, Pokja Saberpungli dan Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan pencegahan KKN, Tunas Integritas, Aksi PPK dan Saberpugli
	d. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 2 OPD	Pengembangan Zona Integritas	Penerapan Zona Integritas pada SKPD	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	SKPD	2	103.300.000	Inspektur dan Irbanwas	Melakukan evaluasi kepada OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK.
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	a. Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	TW 1 : 20 % TW 2 : 25 % TW 3 : 25 % TW 4 : 25 %	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Kegiatan evaluasi temuan hasil pengawasan yang dilaksanakan.	Kegiatan	4	136.500.000	Inspektur dan Irban-Irban, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas TLHP.

	SASARAN STRATEGIS			KEGIATAN				PENANGGUNG		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	JAWAB	KETERANGAN
Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	a. Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 45 Orang	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan	Orang	45	63.860.000		Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) pada setiap penugasan pemeriksaan.
Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 95 % TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 3 : - TW 4 : 95 %	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan baik sesama APIP dan Eksternal APIP	Kegiatan	60	543.000.000	Sekretaris	Kegiatan yang dilaksanakan bersifat koordinasi pengawasan dalam rangka cakupan pengawasan dan penyusunan program pengawasan baik sesama APIP dan Eksternal APIP
		TW 4 : 95 %	Onerasional /Program/Kegiatan G	 enerik/Overhead (Yang Tidak Men	nnunyai Sasaran Strategis \					
	a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	TW 1 : 3 bulan TW 2 : 3 bulan TW 3 : 3 bulan TW 4 : 3 bulan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	bulan	12	1.142.640.000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah yang berhubungan dengan Administrasi Perkantoran.
	b. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	TW 1 : 3 Unit TW 2 : 3 Unit TW 3 : 2 Unit TW 4 : 2 Unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Unit	10	141.100.000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana.
	c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda.	TW 1 : 2 Keg TW 2 : 2 Keg TW 3 : 2 Keg TW 4 : 2 Keg	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	30	343.000.000	Inspektur, Sekretaris, Irban- Irban dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur dalam bentuk pelatihan, bimtek, workshop dan seminar.
	d. Penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.	TW 1 : 2 Lap TW 2 : 2 Lap TW 3 : 2 Lap TW 4 : 3 Lap	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Laporan	9	78.000.000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan mulai perencanaan sampai pelaksanaan.

Samarinda, 4 Januari 2018

Inspektur,

M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CRMP Pembina Utama Madya NIP. 19640519 198503 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah: INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tahun : 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan	a. Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	WTP
	Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi	b. Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	80
	Pemerintah (SAP)	c. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	80
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan	a. Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja	97
	evaluasi APIP	b. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	75
		c. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota	75
		d. Persentase EKPPD Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi	80
3.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan	a. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	95
	pemerintahan	b. Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi	2
		c. Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai	10
		d. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM	2
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	a. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90
5.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.	a. Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	45
6.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan	a. Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai (48 OPD)	95
	pengawasan	b. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	95

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP DARI INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN SEBELUMNYA TAHUN 2018 (REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTINYA)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rencana Aksi
1.	Meningkatkan capaian nilai hasil akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh di tahun 2018 dalam katagori penilaian BB (Sangat Baik)	Pada tahun 2019, hal ini menjadi perhatian utama, sehingga beberapa usaha yang telah dilakukan antara lain akan berusaha mempertahankan capaian yang telah mencapai A, meningkatkan capaian yang nilainya C akan ditingkatkan menjadi B atau A. Usaha yang akan dilakukan antara lain: 1. Apa yang telah ditargetkan akan dicapai secara maksimal, 2. Capai kinerja ditahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya, 3 Memberikan informasi kinerja yang dapat diandalkan.	ukuran keberhasilan
2.	Melakukan upaya – upaua perbaikan yang konstruktif, sehingga berdampak meningkatnya capaiab sasaran/kinerja organisasi baik output dan outcome yang ditetapkan dan dilaporkan.	Upaya – Upaya perbaikan antara lain : 1. Membuat perencanaan kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dicapai setiap tahunnya. 2. Kualitas pengukuran kinerja dan	 Melakuan evaluasi atas Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan. Melakukan evaluasi atas Pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan. Melakukan evaluasi di internal dalam rangka pencapaian penetapan kinerja baik yang sudah

- implementasinya akan ditingkatkan dengan meningkatkan capaian kinerjanya yang akan dievaluasi setiap triwulan dilaporan sekali dan berkenaan kendala yang dihadapi dan upayaupaya akan dilakukan dalam rangka soluisinya.
- 3. Meningkatkan evaluasi internal yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.
- 4. Akan memanfaatkan informasi kinerja sebagai bahan penetapan tahun berikutnya yang disesuaikan dengan penatapan kinerja yang telah dibuat.
- 5. Akan meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumya.
- 6.Meningkatkan informasi mengenai kinerja agar dapat diandalkan.

- tercapai maupun yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- Memberikan informasi yang memadai atas Capaian Kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak yang berkompeten.